

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua maka buku Rencana Strategik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2007 – 2011 ini dapat disusun dengan baik

Subtansi dari Rencana Strategik ini sudah barang tentu tidak terlepas dari acuan Rencana Strategik (RPJM) Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi melalui Perda No.4 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001 – 2005.

Selain mengacu Rencana Strategik Provinsi tersebut telah pula dicoba memperhatikan parameter-parameter strategik yang mempengaruhi kinerja institusi, dan dengan melakukan analisis sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka diharapkan langkah-langkah strategik yang konkrit dan dapat diimplementasikan dan dapat diformulasikan di dalam Rencana Strategik ini.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2007 – 2011 ini.

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat diacu untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta menjadi sumber-sumber ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kehutanan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang kita harapkan.

Jambi, April 2008
KEPALA DINAS,

Ir.H. BUDIDAYA, M.For.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 710 009 367

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang	1
B.	Maksud dan Tujuan	2
BAB II : RENCANA STRATEGIK		
A.	Lingkungan Stratejik Internasional.....	4
B.	Lingkungan Stratejin Nasional	5
C.	Lingkungan Stratejik Provinsi	6
BAB III: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
A.	VISI	9
B.	MISI	9
C.	TUJUAN	10
D.	SASARAN	11
BAB IV: IDENTIFIKASI POTENSI		
A.	Kekuatan	13
B.	Kelemahan	14
C.	Peluang	15
D.	Ancaman	16
BAB V : STRATEGI, ASUMSI DAN NILAI-NILAI		

A.	Strategi	17
B.	Asumsi	17
C.	Nilai-nilai	18

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN

A.	Program	19
B.	Kegiatan	20

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka perlu adanya peningkatan kinerja dari setiap instansi pemerintah.

Kinerja dari suatu instansi memang perlu dievaluasi dengan memakai instrumen-instrumen yang obyektif, agar dapat diketahui sejauh mana prestasi yang telah dicapai oleh instansi tersebut.

Evaluasi kinerja pada suatu instansi sudah barang tentu baru dapat dilakukan apabila ada suatu rencana kegiatan dari yang bersangkutan. Dengan membandingkan antara rencana dan realisasi pencapaian hasil pelayanan barulah dapat diketahui sejauhmana prestasi/kinerja dari instansi tersebut.

Banyak cara dalam penyusunan suatu rencana, dan banyak pula parameter-parameter yang mempengaruhi sebuah rencana, oleh karena itu suatu perencanaan stratejik mutlak diperlukan.

Rencana stratejik mengandung kegiatan-kegiatan yang bersifat antisipatif, korektif, prospektif dan terukur, substansinya mencakup seluruh aspek pembangunan dengan fokus kewenangan yang ada dengan durasi (waktu) jangka pendek 1 tahun dan menengah 5 tahun.

Perubahan lingkungan global yang terjadi sebagai proses alamiah pada tataran dunia pada saat ini datang dan diikuti dengan perubahan lingkungan nasional berupa tuntutan reformasi disegala bidang. Proses reformasi dan demokratisasi yang terjadi menuntut adanya perubahan-perubahan paradigma administrasi pemerintahan, sehingga dapat memperoleh kembali kompetensi utamanya, setelah semuanya terjadi pada tiga tahun ini. Pergeseran-pergeseran

administrasi negara di masa lalu dimana peranan negara yang sangat dominan melalui perencanaan ekonomi dimana pemerintah justru berperan menjadi pelaku pasar atau pembangunan itu sendiri.

Bertolak dari beberapa argumen tentang relevansi pemilihan isu stratejik yang paling menantang pada pemulihan kompetensi utama instansi Dinas Kehutanan pada sektor kehutanan, maka good governance harus diwujudkan sebagai stimulan dalam membenahan pengelolaan hutan di Propinsi Jambi. Namun demikian sangat disadari bahwa pencapaian penertiban / membenahan pengelolaan hutan yang dijiwai oleh isu stratejik good governance menjadi keniscayaan yang sangat sulit untuk dicapai atau dilaksanakan, tetapi langkah-langkah untuk memulainya harus diyakini.

Dalam merunut dan memformulasikan masalah-masalah sekitar pengelolaan hutan, maka dalam penulisan ini akan digunakan alat (tools) dan metode analisis kebijakan dalam merumuskan masalah. Selanjutnya akan digunakan penerapan pengetahuan tentang penyusunan Perencanaan Stratejik (Strategic Plan) guna merumuskan secara jernih berdasarkan kemampuan dan lingkungan stratejik (internal maupun eksternal), yang dirumuskan berdasarkan suatu visi dan misi yang realistis, selanjutnya dapat mulai ditentukan strategi, tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan lebih lanjut atas kebijaksanaan organisasi, yang diuraikan dalam program-program dan kegiatan, akan memerlukan pertimbangan ketersediaan input (masukan) baik dana maupun sumber daya yang lain yang menjadi bagian dari penetapan indikator kinerja, yang pada akhirnya akan berguna dalam tindak lanjut pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang menjadi bagian dari proses Manajemen Kinerja (Performance Management).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2007 - 2011 adalah memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh Rimbawan Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan cita-cita dan

pembangunan kehutanan sesuai dengan visi – misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2007 – 2011 adalah sebagai arahan kebijakan yang strategi pembangunan kehutanan dalam menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2011.

II. KAJIAN LINGKUNGAN STRATEJIK

A. Lingkungan Strategik Internasional

Perubahan tatanan global yang terjadi sangat pesat, merupakan lingkungan strategik global yang perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan pada penetapan alternatif strategi pada setiap strata kewenangan kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten.

Lingkungan strategik Internasional ini antara lain :

- ⌘ Ketergantungan Indonesia kepada lembaga donor Internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan CGI (*Consultative Group on Indonesia*), akibat krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi, sehingga mendesak Indonesia menyampaikan komitmen-komitmennya sebagai konsekuensi atas kucuran bantuan yang diterima. Komitmen-komitmen tersebut antara lain adalah Lol (*Letter of Intent*) IMF dan Komitmen Pemerintah RI kepada CGI pada Sidang CGI Februari 2000, di Jakarta, menyangkut perbaikan pengelolaan sumber daya hutan dan industri berbasis kehutanan.
- ⌘ Perkembangan pasar bebas global maupun regional , antara lain terjalannya kesepakatan-kesepakatan AFTA (*Asian Free Trade Agreement*), NAFTA(*North Atlantic Free Trade Agreement*), GATT(*General Agreement for Trade and Tariff*), dan WTO (*World Trade Organization*), akan menjadi faktor yang mempunyai pengaruh signifikan dalam penetapan kebijakan-kebijakan administrasi publik. Pasar bebas global ini akan berpengaruh pada kebijakan yang berkenaan dengan nilai sebenarnya (*actual value*) dari kayu, dan secara sistemik akan mempunyai daya ungkit /pengungkitan (*leverage*) kepada Sistem Pengelolaan Kehutanan di Indonesia.
- ⌘ Isu lingkungan global dengan penajaman meningkatnya temperatur bumi yang disertai pencairan gletser di kutub utara, yang sudah nyata menekan dan menuntut Indonesia memperbaiki kinerja pengelolaan sumber daya hutan dan industri berbasis kehutanan, memerlukan sikap tanggap administrasi

publik di dalam menetapkan pilihan alternatif strategiknya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Internasional. Penerapan *ecolabel* adalah manifestasi dari tekanan Internasional kepada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia.

Kekuatan pengaruh lingkungan strategik global ini ternyata sudah dapat digambarkan oleh adanya kewajiban yang dituntut masyarakat internasional kepada Indonesia antara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada CGI (Consultative Group on Indonesia).

B. Lingkungan Strategik Nasional

Otonomisasi atau desentralisasi yang sedang berlangsung pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan lingkungan strategik Nasional, yang akan berpengaruh sangat nyata di dalam penetapan kebijakan publik dan operasionalisasi administrasi publik di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peletakan kewenangan yang besar pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan titik balik tumpuan tanggung jawab dan mobilitas kebijakan yang semula sentralistik menjadi terbagi kepada Provinsi-Provinsi dan kabupaten-kabupaten. Kegagalan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten menanggapi pergeseran lingkungan strategik ini, akan merupakan kegagalan pemerintah mensinergikan mobilitas kebijakan dan pada akhirnya akan merupakan kegagalan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya.

Kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yaitu :

1. Pemberantasan penebangan liar.
2. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan penekanan pada upaya-upaya pencegahannya.

3. Restrukturisasi sektor kehutanan, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya hutan.
4. Pembangunan hutan tanaman/rehabilitasi, yang ditujukan untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang rusak agar meningkat produktivitasnya.
5. Desentralisasi bidang kehutanan juga diangkat sebagai isu stratejik dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Dinas Kehtanan Provinsi Jambi.

Melihat dari pengalaman telah terjadi perubahan pemilihan langsung bagi jabatan mulai dari Bupati, Gubernur sampai dengan Presiden, membawa implikasi perhatian Pemerintah kepada rakyat (dalam hal hak masyarakat) menjadi semakin besar.

Pada sektor kehutanan juga telah membuat kebijakan yang fundamental mengenai Tata Usaha Kayu, melalui P55 Tahun 2006 telah terjadi perubahan yang mendasar, semula official assestmen berubah menjadi self assestmen. Hal ini memberi arti bahwa tanggung jawab peredaran hasil hutan telah beralih dari Pemerintah kepada perusahaan.

c. Lingkungan Stratejik Provinsi

Kesenjangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dari sumber daya alam hutan, dengan kebutuhan bahan baku industri berbasis kehutanan, merupakan faktor lingkungan stratejik di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH), yaitu industri yang menggunakan kayu bulat sebagai bahan bakunya, berdasarkan kapasitas produksi ijin yang dimiliki memerlukan bahan baku kayu bulat sebanyak 4,1 Juta M3 pertahun. Sedangkan ketersediaan bahan baku kayu bulat yang ada, berdasarkan sistem Pengelolaan Hutan Lestari/ berkelanjutan (*Sustainable Forestry Management*), paling besar hanya sebesar 1,0 Juta M3 pertahun.

Masih ada fakta yang lain, adalah bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi, pendirian Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) atau Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) tanpa ijin (*illegal*), terutama dalam bentuk Sawmill (penggergajian kayu) semakin menjadi-jadi. Sampai saat ini di seluruh wilayah Provinsi Jambi sekurang-kurangnya terdapat 290 buah Sawmill liar (*illegal*). Disamping itu juga terdapat Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL), yaitu yang mengolah kayu dengan bahan baku kayu gergajian/ produk kayu setengah jadi, namun telah dioperasikan sebagai IPKH /IPHH/Sawmill.

Sebaliknya perusahaan hutan yang resmi seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) semakin berkurang secara drastis, sehingga secara formal penyediaan bahan baku kayu bulat resmi juga semakin kecil.

Di Provinsi Jambi juga terdapat 4 (empat) unit Taman Nasional (National Park), yang merupakan beban amanat dari masyarakat Internasional, untuk dijaga keutuhannya. Keempat Taman Nasional tersebut adalah :

1. Taman Nasional Kerinci Seblat
2. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
3. Taman Nasional Berbak, dan
4. Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Lingkungan strategik yang lain adalah kondisi masyarakat lokal yang melakukan perambahan lahan kawasan hutan dan penebangan liar (*illegal logging*) yang saat ini semakin tidak terkendali/ anarkis dengan dalih bahwa saat ini seluruh potensi sumber daya alam harus dapat langsung dinikmati oleh rakyat sebagai tebusan atas semua yang telah terjadi pada pemerintahan yang lalu.

Provinsi Jambi telah merumuskan Rencana Strategiknya, untuk Sektor Kehutanan melalui Program-program yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Agribisnis dan lainnya.
2. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Pengembangan ketahanan dan keamanan pangan.

4. Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan.
5. Pengembangan industri yang berbasis pertanian.
6. Pemantapan keterkaitan pedesaan dan perkotaan.
7. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
8. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
9. Pengembangan rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir pantai.
10. Pengendalian perencanaan dan kualitas lingkungan hidup.

Program-program di atas adalah sarana yang tetap dipertimbangan untuk dilaksanakan melalui penajaman arah kegiatan suatu penetapan/perumusan visi dan misi organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang ingin dicapai.

III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Berdasarkan kenyataan di lapangan, Dinas Kehutanan Propinsi Jambi belum dapat merumuskan visinya, karena sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 , sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, belum dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan belum disosialisasikannya Sistem AKIP sebagai suatu prosedur kerja yang baku di daerah.

Perumusan visi organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam karya tulis ini pada akhirnya tidak akan disusun semata-mata bersumber kepada kebijakan formal yang telah ada, tetapi akan digali dari kondisi lingkungan strategik saat ini.

Memperhatikan komitmen Indonesia kepada CGI (Consultative Group on Indonesia) dan fakta-fakta lapangan yang ada pada saat ini, perumusan visi yang akan dijadikan pedoman operasional dan diharapkan dapat disepakati serta dihayati oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan, adalah :

"Dinas Kehutanan dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara tertib dalam komitmen pelaksanaan good governance "

B. MISI

Misi organisasi diharapkan akan dapat mencapai tujuan dibentuknya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dan seharusnya menjadi satu-satunya instansi yang mempunyai kompetensi utama di Propinsi Jambi dalam pengelolaan hutan secara lestari, serta dalam jangka pendek diorientasikan untuk mencapai komitmen Indonesia kepada masyarakat

Internasional (CGI), yang secara prinsip akan merupakan pencapaian upaya perbaikan kondisi pengelolaan di Propinsi Jambi khususnya, dan secara umum akan mensinergikan perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Nasional.

Misi Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh instansi yang mempunyai kompetensi dalam upaya penertiban penebangan dan penutupan industri perkebunan liar.
2. Mendukung dan melaksanakan inventarisasi untuk menaksir sumber daya hutan provinsi sebagai basis dan potensi untuk mengelola hutan dan bahan penyusunan program yang menjadi bagian dari penyusunan program hutan nasional (National Forest Program – NFP)
3. Mengkoordinasikan penataan kembali industri berbasis kehutanan dalam rangka penyeimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasok bahan baku kayu.
4. Melaksanakan upaya penghutan kembali kawasan hutan yang telah rusak dan terdegradasi.

C. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi organisasi maka sebagai langkah selanjutnya, perlu dirumuskan tujuan organisasi berdasarkan penetapan Faktor Kunci Keberhasilan yang telah dipilih berdasarkan prioritas tertinggi dari strategi alternatif yang tersedia. Penetapan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Penetapan tujuan ini juga harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Tujuan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan komitmen dan sinergi diantara stake holders bidang kehutanan berdasarkan kerangka kebijakan yang ada.

2. Mewujudkan database (data dasar) sebagai acuan pelaksanaan sitem pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, menjadi bagian National Forest Inventory (NFI) dan National Forestry Program(NFP).
3. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Industri berbasis kehutanan yang legal, melalui penertiban dan penutupan industri (IPKH) liar dan penertiban sistem peredaran kayu dan sistem perdagangannya.
4. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan untuk kepentingan aspek produksi maupun konservasi, dengan melibatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat.
5. Mewujudkan tersedianya dana dari potensi yang ada, baik dana pemerintah pusat, bantuan atau investasi internasional dan partisipasi masyarakat / sektor swasta.
6. Mewujudkan mekanisme pengendalian kesenjangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan keutuhan industri berbasis kehutanan melalui kebijakan publik yang terintegrasi.

D. SASARAN

Sasaran organisasi dirumuskan untuk menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Pada tahap berikutnya sasaran ini akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Aggressive but Attainable*), berorientasi kepada hasil (*Result oriented or Realistic*) dan dapat direalisasikan dalam waktu tertentu (*Time bound*), biasanya disingkat sebagai SMART.

Sasaran organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tersusunnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (HTR, HKM)
3. Transparansi pengelolaan hutan (jaringan informasi)

4. Penanggulangan illegal logging dan illegal trade
5. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
6. Reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan
7. Revitalisasi industri.

IV. IDENTIFIKASI POTENSI

Pemilihan lingkungan internal dalam konteks yang berkenaan dengan kompetensi administrasi publik disini adalah dalam kerangka pemikiran tentang upaya perwujudan good governance, sehingga tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai lingkungan instansi Dinas Kehutanan sebagai suatu organisasi, tetapi lebih ditujukan kepada suatu lingkungan internal dimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sekitar sektor kehutanan, sudah menjadi suatu kerangka sistem dalam pengelolaan hutan.

A. Kekuatan (Strength)

Dari identifikasi kekuatan internal dari organisasi yang menonjol yang dapat dirumuskan selengkapnya , antara lain adalah :

1. Sistem pengelolaan hutan yang telah ada dan secara formal masih berlaku dan masih dapat dilaksanakan, antara lain sistem Tata Usaha Kayu dan dokumentasi legalitas peredaran kayunya, mekanisme kerja penga-wasan dan pembinaan pengelolaan yang masih berlaku termasuk metoda dan prosedur Inventarisasi Hutan untuk pelaksanaan bagian pekerjaan National Forestry Program (NFP) dan National Forest Inventory (NFI).
2. Personil dengan kualifikasi berbasis pendidikan ilmu kehutanan, baik tingkat strata, diploma, maupun tenaga menengah bidang kehutanan, baik yang bekerja di sektor pemerintah dan telah terstruktur maupun di sektor swasta.
3. Industri Pengolahan Kayu Hulu / Industri Primer Hasil Hutan besar maupun kecil yang merupakan investor perintis di bidang kehutanan, masih mempunyai komitmen untuk melestarikan usahanya, yang memiliki pengalaman berusaha yang baik dan dibangun atas dasar landasan penyediaan bahan baku yang memadai, serta masih dapat menghasilkan pendapatan devisa bagi Propinsi Jambi.

4. Kewenangan desentralisasi / otonomi bidang kehutanan yang diletakkan pada Propinsi sebagai Daerah Otonom, yang akan mempermudah manuver kebijakan teknis tetapi masih berpedoman kepada kriteria dan standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Pengaturan penyediaan bahan baku kayu dilakukan ter-pisah dengan penanganan perijinan pendirian dan pembinaan industri berbasis kehutanan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dan sektor swasta atas hukum yang masih rendah dibandingkan desakan ekonomi
3. Belum ada keterpaduan komitmen seluruh pihak yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Hutan.
4. Keterbatasan sumber dana dengan adanya otonomisasi, karena secara struktural Undang-Undang yang telah mengaturnya, dengan konsekuensi pendapatan daerah menjadi mengecil karena belum ada penetapan lain tentang tambahan pendapatan daerah dari sektor kehutanan.

TABEL VI.1. INTERNAL STRATEGIC FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)

FAKTOR STRATEJIK INTERNAL	BOBOT	RATING TERHADAP			RATING Rata2	SKOR
		VISI	MISI	NILAI		
KEKUATAN (STRENGTH)						
1. Sistem Pengelolaan Hutan yang telah ada dan masih berlaku.	0,15	3	3	2	2,65	39,75
2. Sumber Daya Manusia dengan basis Ilmu Kehutanan.	0,15	2	3	3	2,65	39,75
3. Industri Pengolahan Kayu Hulu yang baik dan produktif dan menghasilkan devisa.	0,30	3	4	3	3,35	10,0
4. Wewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Kehutanan.	0,10	3	3	3	3,00	30,0
5. PP No. 34 / 35 Tahun 2002						
KELEMAHAN (WEAKNESS)						
1. Industri berbasis Kehutanan. Pengaturan Sumber Bahan Baku Kayu terpisah dengan penanganan perijinan industri	0,10	3	3	3	3,0	30,0
2. Tingkat kesadaran Masyarakat (swasta dan umum), masih rendah.	0,15	2	3	2	2,35	35,25
3. Belum ada komitmen bersama antar pihak-pihak terkait di sektor kehutanan.	0,15	4	4	3	3,65	54,75
4. Keterbatasan sumber dana.	0,10	3	3	3	3,0	30,0
5. Ketimpangan Input – Output IPKH						
Total skor pembobotan	1,00					269,50

C. Peluang (Opportunity)

1. Kebijakan Nasional untuk penertiban pengelolaan hutan berdasarkan dukungan internasional (ekolabel).
2. Tersedianya pasar regional maupun global yang mempunyai ikatan dagang yang sangat kuat dengan pengusaha industri berbasis kehutanan yang telah ada di Propinsi Jambi.

D. Ancaman (Threat)

1. Kondisi masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada lembaga publik (instansi pemerintah) termasuk Dinas Kehutanan, sehingga tidak dapat menghargai upaya penegakan hukum dan cenderung berlaku anarkis..
2. Sindikat perdagangan kayu liar yang sudah terlanjur terbentuk dan mantap menguasai jaringan pemasaran kayu, baik lokal maupun antar pulau.
3. Produk –produk kayu lapis (plywood) dari negara-negara lain (China) yang yang harganya rendah.
4. Pendirian Industri Perkayuan (IPKH) secara liar yang makin memperlebar kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat dengan kebutuhan bahan baku bagi kelangsungan Industri Perkayuan, dan sama sekali belum memperoleh penanganan secara serius.

TABEL VI.1. EXTERNAL STRATEGIC FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)

FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL	BOBOT	RATING TERHADAP			RATE RATA2	SKOR
		VISI	MISI	NILAI		
PELUANG (OPPORTUNITY)						
1. Kebijakan Nasional untuk penertiban pengelolaan hutan berdasarkan dukungan Internasional.	0,20	3	3	3	3,00	60,0
2. Tersedianya pasar regional maupun global yang potensial.	0,20	2	3	3	2,65	53,0
ANCAMAN (THREAT)						
1. Kondisi masyarakat yang kehilangan kepercayaan.	0,05	2	2	2	2	10,0
2. Sindikat perdagangan kayu liar yang sudah terlanjur terbentuk.	0,20	4	3	2	3	60,0
3. Produk kayu dari negara lain dengan harga yang murah.	0,05	2	2	2	2	10,0
4. Pendirian Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) secara liar.	0,30	4	4	4	4	120,0
Total skor pembobotan	1,00					313,0

Catatan : Bobot = 0 % tidak penting s/d 100 % paling penting

Rating / pengaruh :

1. tidak berpengaruh
2. kurang berpengaruh
3. berpengaruh
4. sangat berpengaruh

V. STRATEGI, ASUMSI DAN NILAI-NILAI

A. Strategi

Memperhatikan dan mempelajari Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka dicoba dilakukan analisa Swot.

Dari hasil analisa Swot tersebut, dapat ditetapkan strategi-strategi yang akan dipakai dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu :

1. Pemantapan data base Kehutanan Propinsi dengan memanfaatkan sistem dan SDM yang tersedia.
2. Memantapkan investasi Pengusahaan Hutan dan Industri berbasis Kehutanan, untuk jaminan perolehan devisa.
3. Penutupan IPKH liar dan penyekatan sistem perdagangan kayu liar (illegal), sesuai kewenangan dan sistem hukum dan kebijakan yang tersedia.
4. Mendorong partisipasi IPKH yang baik dalam upaya penertiban sistem eksploitasi hutan dan perdagangan produk kayu dan turunannya (industri hilirnya).
5. Membangun komitmen pihak terkait di bidang kehutanan, untuk penegakan hukum di bidang Kehutanan.
6. Menggali sumber dana dengan memanfaatkan dukungan Pusat dan Internasional, dan dana dari partisipasi sektor swasta.
7. Menyatukan pengendalian bahan baku dan penggunaannya di bidang kehutanan.
8. Sosialisasi penegakan hukum di bidang Kehutanan, untuk menggugah partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

B. Asumsi

Asumsi adalah merupakan konklusi tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi dalam mencapai visi dan

melaksanakan misinya, karena akan berpengaruh terhadap hubungan internal organisasi. Asumsi ini akan dipakai sebagai dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan stratejik , dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan stratejik.

Dalam hubungannya dengan substansi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, dapat dirumuskan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pembiayaan untuk data base Kehutanan Propinsi masih memperoleh dukungan sistem dan dana pemerintah pusat.
2. Investasi Pengusahaan Hutan dan Industri berbasis Kehutanan dalam kerangka sistem yang telah ada masih dihargai.
3. Kewenangan dan sistem hukum dan kebijakan yang tersedia masih dianggap relevan dalam proses otonomisasi.
4. Dukungan politis dari kalangan legislatif dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk pembenahan sektor kehutanan dapat dikonsolidasikan.
5. Proses otonomisasi dapat terlaksana dengan baik, dalam arti ada kesadaran bersama bahwa peletakan kewenangan di bidang kehutanan tidak hanya bermakna desentralisasi wewenang tetapi juga berkenaan dengan pertanggung jawabannya.
6. Komitmen dukungan Internasional kepada Indonesia, tetap tersedia dalam kerangka kerjasama bilateral maupun multilateral.

C. Nilai-nilai

Nilai-nilai yang akan diterapkan dalam pelaksanaan misi untuk pencapaian visi organisasi, adalah nilai-nilai yang memenuhi prinsip-prinsip semangat pelaksanaan Good Governance, yaitu : *Kejujuran, Keterbukaan, Komitmen, Akuntabilitas, Kesetaraan, dan Supremasi Hukum.*

VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan dengan memperhatikan nilai-nilai serta asumsi, adalah penetapan Program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan dan Proyek.

Dalam penetapan Program ini Dinas Kehutanan tetap merujuk kepada Program-Program yang telah ada pada Rencana Strategik Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, ada 10 Program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kehutanan, yaitu :

1. Pengembangan Agribisnis dan lainnya.
2. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Pengembangan ketahanan dan keamanan pangan.
4. Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan.
5. Pengembangan industri yang berbasis pertanian.
6. Pemantapan keterkaitan pedesaan dan perkotaan.
7. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
8. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
9. Pengembangan rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatn sumber daya wilayah pesisir pantai.
10. Pengendalian perencanaan dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan tetap merujuk pada Program Pemerintah Daerah Propinsi Jambi tersebut, maka Dinas Kehutanan mewujudkan Program sebagai perumusan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan sasaran organisasi, maka rumusan program adalah sebagai berikut :

1. Pemberantasan dan penertiban penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal.
2. Perlindungan dan penertiban penggunaan kawasan hutan.
3. Penertiban peredaran, perdagangan dan pemilikan satwa/tumbuhan liar yang di lindungi.
4. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
6. Penegakan hukum di bidang kehutanan.
7. Penertiban industri pengeolahan hasil hutan.
8. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam sektor kehutanan.
9. Terlaksananya tertib penatausahaan hasil hutan.
10. Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
11. Pembinaan petugas fungsional (P2LHP, P2SKSHH, P3KB).
12. Revitalisasi industri kehutanan.
13. Pengendalian peralatan perusahaan hutan dalam rangka menuju sustainable forest management.
14. Pemantapan pemanfaatan potensi SDH.
15. Rehabilitasi hutan dan lahan.
16. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam/SDA
17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
18. Optimalisasi pengelolaan lingkungan dalam perusahaan hutan.
19. Pemantapan aspek legalitas.
20. Pengumpulan data, statistik dan pemantapan sistem informasi/peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.
21. Koordinasi perencanaan dan pembangunan.
22. Koordinasi untuk membangun jejaring kerja dengan multi stakeholders atau litbang dan iptek serta meningkatkan SDM.
23. Revitalisasi pemanfaatan SDA/hutan.
24. Sosialisasi peraturan perundangan.

B. KEGIATAN

Tahapan selanjutnya yang merupakan penjabaran dari Program ialah Kegiatan-Kegiatan yang akan dilakukan yang bersifat stratejik.

Kegiatan ini dapat bersifat kegiatan yang didukung oleh pendanaan yang teranggarkan dan atau Kegiatan yang bersifat Rutin serta dimungkinkan timbulnya kegiatan-kegiatan baru sesuai dengan isue-isue yang berkembang di Provinsi, Nasional dan Internasional.

Adapun Kegiatan-Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara / pelanggaran illegal logging melalui proses justisial
2. Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Kab/Kota.
3. Penyusunan Protap Pos PHH.
4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum di Propinsi Jambi dan Kabupaten.
5. Pelaksanaan Gelar Perkara.
6. Pembinaan dan Koordinasi Operasional Pos PHH.
7. Melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Hutan dan Kehutanan.
8. Penyuluhan Kehutanan.
9. Penyegaran Polhut dan PPNS.
10. Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dibidang kehutanan.
11. Patroli pengamanan dan peredaran hasil hutan.
12. Operasi Khusus pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan.
13. Operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan.
14. Intelijen kasus pelanggaran dibidang kehutanan.
15. Penyidikan kasus illegal, logging perambahan kawasan hutan dan pembakaran hutan/lahan.
16. Diklat PPNS.

17. Deteksi dan pemantauan dini kebakaran hutan dan lahan.
18. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
19. Pelatihan bagi petugas dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
20. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
21. Pembentukan dan optimalisasi organisasi PUSDALKARHUTLA Propinsi dan Pembinaan POSKOLAK tingkat Kabupaten dan SATLAK tingkat Kecamatan.
22. Penyuluhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kampanye).
23. Operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
24. Peningkatan koordinasi dalam rangka normalisasi industri kehutanan.
25. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perijinan industri kehutanan.
26. Monitoring dan evaluasi penggunaan bahan baku industri kehutanan.
27. Peningkatan pengawasan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu.
28. Peningkatan penerimaan pendapatan negara melalui kerjasama instansi terkait.
29. Peningkatan pembinaan dan pengawasan perijinan industri kehutanan.
30. Inventarisasi IPKH/IPHH Legal dan Illegal.
31. Kegiatan reboisasi dan penghijauan.
32. Merencanakan pembuatan model Rehabilitasi Areal eks HPH.
33. Pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
34. Pengembangan dan pendayagunaan hutan.
35. Merencanakan / pembuatan model kerja sama HPH dengan masyarakat.
36. Pembuatan demonstrasi model desentralisasi pengelolaan hutan melalui partisipasi multi pihak di Propinsi Jambi.
37. Kegiatan pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat Jambi.
38. Pengembangan komoditas kehutanan kayu dan non kayu yang memiliki prospek pasar.

39. Kemitraan usaha dibidang kehutanan.
40. Melakukan koordinasi dengan Litbang Dephut dalam upaya aplikasi teknologi di bidang Hutan dan Kehutanan.
41. Pembinaan peningkatan produksi pangan melalui kegiatan tumpangsari pada areal HTI.
42. Pembinaan peningkatan produksi pangan melalui kegiatan PMDH pada areal HPH dan HPHTI.
43. Pengawasan dan monitoring areal konservasi pada HPH/HPHTI.
44. Koordinasi dan kesepakatan dengan Dinas Kabupaten mengenai pelaksanaan penataan batas luar dan fungsi kawasan hutan.
45. Rapat koordinasi secara rutin dengan Dinas Kab/Kota dan UPT.
46. Koordinasi sebagai mediator dalam rangka "*problem solving*" dengan Dinas Kab/Kota.
47. Seminar, diskusi dengan multi stake holder (LSM, Perguruan Tinggi, Dinas Lintas Sektoral) mengenai hutan dan kehutanan serta meningkatkan SDM.
48. Peningkatan kinerja pengelolaan hutan produksi.
49. Pengembangan dan pendayagunaan hutan di 10 Kabupaten.
50. Inventarisasi potensi hutan pada areal virgin forest HPH.
51. Menyiapkan data dan informasi hutan dan kehutanan.
52. Menyiapkan data dan peta penutupan lahan pada tiap Kabupaten.
53. Membuat peta tematik untuk Kabupaten.
54. Kegiatan orientasi dalam rangka penataan batas HPH.
55. Pemeliharaan batas luar kawasan hutan TNB.
56. Identifikasi dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan.
57. Peningkatan keterampilan dan penyegaran petugas teknis kehutanan.
58. Menghimpun data dan mengusulkan Diklat Kepegawaian.
59. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Perizinan di 9 Kab/Kota.
60. Koordinasi pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dengan Dinas Kabupaten.

61. Koordinasi re-identifikasi perubahan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan dengan Dinas Kabupaten (RTRWP).
62. Koordinasi rencana keperluan lahan untuk pembangunan non kehutanan dengan lingkup sektoral.
63. Rapat Evaluasi Pembangunan kegiatan/Proyek APBD maupun dekonsentrasi dengan para UPT.
64. Menyusun DUP/DUK kegiatan/proyek pembangunan yang bersumber dana APBD dan Non APBD.
65. Menyusun kegiatan anggaran pendampingan dengan Multipihak.

Matrik